

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karet (*Hevea brasiliensis* Muel Arg) adalah salah satu komoditas perkebunan yang penting baik dilingkup Indonesia maupun bagi internasional. Indonesia pernah menguasai produksi karet dunia dengan mengungguli produksi negara-negara lain. Tanaman karet merupakan salah satu komoditas perkebunan yang menduduki posisi yang cukup penting sebagai sumber devisa non migas bagi Indonesia. Luas areal karet Indonesia saat ini 85% (2,8 juta ha) merupakan areal perkebunan karet rakyat yang memberikan kontribusi 81% terhadap produksi karet alam nasional (Balit Sumbawa, 2009).

Tanaman karet telah menjadi salah satu penyongkong perekonomian Indonesia yang cukup signifikan sejak beberapa dekade yang lalu. Tanaman karet dikenal dengan beberapa sebutan, seperti *lastik bara* (Arab), *caucho* (Spanyol), *caoutchoc de Para* (Prancis), atau *kausuu* (Kamboja). Secara ilmiah, bahasa latin untuk tanaman ini adalah *Hevea brasiliensis* Muell. Arg.

Karet alam pada umumnya digunakan untuk membuat aneka ragam seperti aneka ban kendaraan (mulai dari sepeda, motor, mobil, traktor, hingga pesawat terbang), sepatu karet, sabuk penggerak dll, karet juga sering digunakan untuk pembuatan alat-alat rumah tangga, dan kantor, seperti, lem, perekat barang serta peralatan tulis menulis seperti karet penghapus. Karet juga bermanfaat sebagai bahan-bahan bagian dari peralatan ataupun kendaraan-kendaraan perang dan bermanfaat sebagai pencegahan lecet atau rusaknya kulit ternak karena lantai semen yang keras.

Hevea brasiliensis Muel Arg adalah tanaman spesifik karena pelukaan pada kulitnya yang menjadikan tanaman ini bernilai ekonomi. Penyadapan dilakukan agar lateks dapat mengalir ke luar batang dengan mengiris kulit teratur. Keteraturan berfokus kepada keteraturan tebalnya irisan kulit. Penyadapan dilakukan pada jam 01.00 dini hari dan sampai selesai.

Sistem sadap S/2 D3 dan S/2 D4 adalah sistem sadap $\frac{1}{2}$ spiral yang dilakukan

10 hari dalam 1 bulan sedangkan S/2 D4 adalah sistem sadap $\frac{1}{2}$ yang dilakukan 7 hari dalam 1 bulan yang mana penyadapan harus dilakukan secara bergilir dari gilir A/B/C dan untuk sistem sadap S/2 D4 dilakukan secara bergilir juga dari gilir A/B/C/D. Setiap sistem sadap ada waktu jeda untuk melakukan penyadapan pohon yang sudah disadap sebelumnya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir adalah untuk :

- A. Menghitung produksi lateks dari sistem sadap (S/2, D/3) dan (S/2,D/4) pada High Grade dan Ligh Grade
- B. Menghitung produksi karet dalam jangka waktu 3 tahun dengan menggunakan sistem sadap (S/2, D/3) dan (S/2, D/4).

1.3 Kontribusi

Kontribusi dari tugas akhir ini diharapkan agar pembaca mendapatkan informasi dan ilmu mengenai perbandingan frekuensi penyadapan (S/2,D/3) dan (S/2,D/4) terhadap produksi tanaman karet.

II. KEADAAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan

- a. Nama Perusahaan : PT. Perkebunan Nusantara VIII
- b. Alamat Perusahaan : Jl. Sindangsima No.4 Bandung
- c. No Telepon : (62-22) 20238966
- d. Nama Kebun : Kebun Jalupang
- e. Alamat Kebun : Jl. Cipeundeuy KM20 Subang

2.2 Jenis Komoditi

Kebun Jalupang mengembangkan komoditas karet yang terbagi menjadi 4 afdeling yaitu afdeling jalupang 1, afdeling jalupang 2, afdeling jalupang 3, dan afdeling jalupang 4 dengan lahan seluas 3.745,89 Ha. Hasil produksi karet diolah dipabrik RSS (*Ribbed Smoke Sheet*) dengan kapasitas terpasang 12 ton/hari dan pabrik lateks pekat dengan kapasitas terpasang 5ton/hari.

2.3 Sejarah Singkat PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Jalupang

PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Jalupang Subang adalah merupakan suatu perkebunan yang pengelolaannya selalu berganti - ganti, maka untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai sejarah Perkebunan ini, maka membagi waktu perjalanan roda sejarah perkebunan ini dalam tiga periode, yaitu:

1. Periode zaman Pemerintahan Belanda
2. Periode zaman Pemerintahan Jepang
3. Periode zaman Kemerdekaan, yang terbagi pula menjadi lima tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat pengusahaan oleh pemerintah Daerah Jawa Barat.
 - b. Tingkat pengusahaan sementara.
 - c. Tingkat pengusahaan penuh.
 - d. Tingkat kembali ketangan pemerintah RI
- c. Periode zaman Pemerintah Belanda

Pada tahun 1812 dua orang bernama Mutinghe dan Sharpnell memberi dua bidang tanah yang sangat luas, ialah tanah Pemanukan dan tanah Ciasem dari pemerintah.

Kemudian tanah tersebut didaftarkan dengan nama **“ PAMANUKAN EN TJIASSEM LANDEN “ (P en T Landen)**. Tanah-tanah tersebut merupakan satu bidang tanah yang luasnya 212.900 hektar, dengan hak Eigendom, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- a. Utara : Laut Jawa.
- b. Timur : Sungai Cipunagara dan sebagian keresidenan Cirebon.
- c. Selatan : Tanah-tanah terbentang sampai pegunungan.
- d. Barat : Keresidenan Priangan dan sungai Cilamaya.

Tanah-tanah tersebut pada waktu itu tidak banyak hasilnya. Hanya terdiri dari pada beras, kelapa dan kopi, sedangkan yang ditanam oleh rakyat atau penduduk yaitu gula dan arak yang dibuat secara sedehana sekali.

Sepeninggal Tuan Sharpnell pada tahun 1930, diangkat seorang manager atau penguasa yang selain ditugaskan untuk mengusahakan tanah-tanah itu, juga diberi tugas Khusus/terpenting, yaitu “penghematan keras dalam pengeluaran uang” .

Pada tahun 1840 tanah-tanah tersebut dari bangsa Inggris dijual kepada dua orang bersaudara dari negeri Belanda, yaitu Hofland bersaudara dengan susah payah maka diputuskanlah untuk merubah tanah-tanah itu dijadikan N.V. Hal ini dilakukan oleh karena Hofland bersaudara membutuhkan modal tambahan mengusahakan tanah-tanah itu. Tanah-tanah itu belum seluruhnya ditanami oleh tanaman perkebunan, maka sampai saat ini belum dapat disebut perusahaan perkebunan.

Dengan demikian maka pada tahun 1886 didirikanlah N.V. Haatschapij Ter Exploitatie Der Pamanukan En Tjiasem Landen. Dari tahun 1886 hingga tahun 1911 sebagian besar dari saham-saham berada ditangan Landbow Maatschapij (N.I. Hand Elsbank). Kemudian saham-saham tersebut dalam tahun 1911 dibeli oleh “ The Anglo Dutch Plantation Of Java Ltd.” Di London, oleh karena itu maka tanah-tanah P & T Landen tersebut berada kembali pada tangan bangsa Inggris. Perlu juga diterangkan disini bahwa pada tahun 1953 nama N.V. Maatschapij der Exploitatie Der Pamanukan En Tjiasem Landen, telah dirubah menjadi :

“P & T LANDS PT” dan nama “THE ANGLO DUTCH” juga dirubah

menjadi "THE ANGLO INDONESIAN PLANTATION LTD".

Pada waktu tanah-tanah itu kembali ketangan bangsa Inggris, maka luasnya masih tetap seperti pada permulaan yaitu seluas 212.900 hektar. Daerah seluas ini merupakan tanah pertikulir terbesar di Pulau Jawa pada masa itu. Pada waktu itu P&T Lands berkantor pusat di kota Subang, dengan membawahi 22 perkebunan yang terdiri dari 13 perkebunan karet, 9 buah perkebunan Teh dan ditambah dengan sebuah pusat perbengkelan, satu buah pusat pergudangan, (gudang hasil dan gudang supply), serta sebuah rumah sakit yang terletak di kota Subang.

4. Periode zaman Pemerintahan Jepang

Pada tahun 1942 mendaratlah tentara Jepang di Pulau Jawa. Maka perkebunan-perkebunan di Indonesiapun jatuh pula ketangan Pemerintahan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang dan tahun-tahun revolusi selanjutnya membawa perubahan penting bagi keadaan perusahaan perkebunan kepunyaan P&T Lands, kerugian yang diderita sangatlah menyedihkan. Dari 22 buah perkebunan itu, tidak kurang dari 10 buah perkebunan dengan luasnya 9.200 hektar sebagian besar telah hancur sehingga tidak mungkin diusahakan lagi. Dua buah Perkebunan dikembalikan lagi kepada Pemerintah, enam buah Perkebunan lainnya telah dijual.

Keadaan di lingkungan Subang tidak lebih baik dari perkebunan sisal "Sukamandi" 90% telah dibongkar dan hanya beberapa ratus hektar saja yang masih terdapat tanaman Sisa yang tidak menghasilkan lagi.

Perusahaan padi "Sukamandi" yang besar dan didirikan antara tahun 1930 dan tahun 1940 dengan ongkos yang mahal telah terhenti. Sebanyak 8.000 hektar sawah yang dapat diairi telah di pakai dan ditempati oleh penduduk setempat secara tidak syah.

Tanah Eigendom dipakai dan ditempati oleh penduduk setempat secara tidak syah, tetapi bagaimanapun masih tetap dapat dan mungkin dikembalikan untuk dipergunakan. Akan tetapi tahun 1949 pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan keinginannya untuk membeli kembali semua tanah yang tidak langsung dibutuhkan oleh P&T Lands, guna kepentingan rakyat atau penduduk. Sebaliknya demikian pula, Pemerintah Republik Indonesia ingin mengembalikan beberapa ribu hektar Hutan Hydrologis menjadi tanah Pemerintah. Di jual kepada

Pemerintah seluas 22.100 hektar tanah yang meliputi seluruh Perusahaan Padi Sukanagara dan beberapa ribu hektar tanah-tanah persedian dan hutan-hutan Hydrologis, sedangkan P&T Lands diperkenankan memiliki 45.600 hektar tanah Eigendom dan 750 hektar tanah-tanah Erfpacht.

5. Periode zaman kemerdekaan

Dalam rangka konfrontasi antara negara Indonesia dengan Malaysia, oleh karena negara Malaysia dianggapnya menjadi proyek Neo Kolonialisme dan Imperialisme Inggris, maka perusahaan-perusahaan perkebunan milik Inggris yang berada di Pulau Jawa, termasuk P&T Lads mengalami tiga fase perubahan, yaitu :

a. Tingkat Pengawasan Oleh Pemerintah Jawa Barat

Dimulai sejak bulan September 1963, yang berlandaskan kepada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor : 376/BI/Pem/Sek/1963 tertanggal 19 September 1963 yang menentukan bahwa semua perusahaan milik Inggris yang berada dalam wilayah Jawa Barat, diawasi sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Jawa barat.

b. Tingkat Pengawasan Sementara

Dimulai sejak bulan Pebruari 1964, yang berdasarkan kepada Surat Keputusan Menteri Pertanian / Agraria nomor : 31/MPA/1964, yang menentukan bahwa semua perusahaan milik Inggris yang berada dalam wilayah Republik Indonesia, diawasi sementara oleh Pemerintah Pusat.

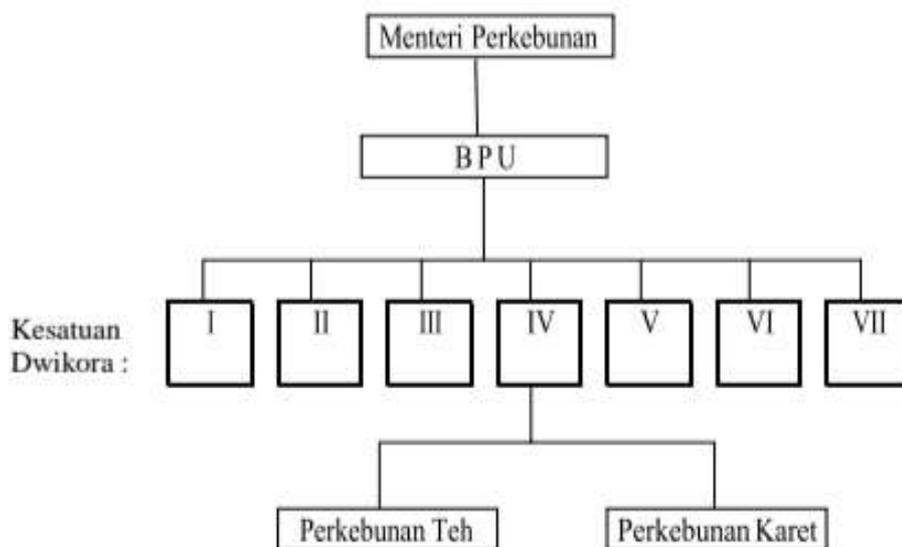
c. Tingkat Penguasaan Penuh

Menurut Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor : 6/1964, yang dikeluarkan dan di undangkan pada tanggal 26 Nopember 1964, maka semua perusahaan-perusahaan milik Inggris yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia, dikuasai sepenuhnya secara langsung serta diurus oleh Pemerintah Pusat.

Terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Edaran Perdana Menteri III nomor D/VII/0452/H-5/1964, tertanggal 31 Januari 1964. Penetapan Presiden tersebut selanjutnya menentukan bahwa pengurusan semua perusahaan milik Inggris yang mengusahakan sendiri atau menguasai usaha- usaha dalam bidang perkebunan dilakukan oleh Departemen Perkebunan.

Dengan demikian sebagai pelaksana penetapan presiden tersebut dalam

bulan desember 1964, Menteri Koordinator Kompartemen Pertanian dan Agraria telah menyerahkan perusahaan-perusahaan Perkebunan Dwikora kepada Menteri perkebunan. Adapun yang dimaksud dengan perusahaan- perusahaan Dwikora adalah perusahaan-perusahaan Perkebunan bekas milik Inggris, yang dijadikan tujuh kelompok kesatuan, yang menginduk kepada sebuah BPU (Badan Pimpinan Umum) yang berkedudukan di Jakarta. Dengan demikian struktur organisasi perusahaan Perkebunan Dwikora, dapat secara ringkas dilukiskan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Perkebunan Dwikora

Sumber : PTPN VIII JALUPANG, 2002

d. Tingkat Joint Venture

Join Venture adalah suatu bentuk kerjasama antara modal asing dengan modal nasional. Bentuk usaha bersama ini didasarkan kepada undang-undang nomor : 1/1967, tentang Penanaman Modal Asing.

Penanaman Modal Asing menurut undang-undang ini dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan yang dari semula modalnya 100% dari modal asing dan modal nasional. Maka sejak tanggal 1 Januari 1970 secara Administratif telah dinyatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini telah mengambil bentuk Joint Venture antara pemerintah Republik Indonesia dengan pengusaha- pengusaha Inggris, dengan perbandingan modal masing-masing sebesar 30 % dan 70%.

e. Tingkat kembali ketangan pemerintah Republik Indonesia

Berdasarkan Keputusan Pemerintah Pusat untuk membeli saham yang

dimiliki oleh Inggris, maka status Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan IV adalah 100% menjadi milik bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan serta faktor-faktor lainnya.

Dengan melihat kepada perjalanan sejarah Perkebunan tersebut di atas, maka kita dapat ketahui bahwa perusahaan perkebunan ini mengalami peralihan-peralihan sebagai berikut :

Tahun 1812 - 1839	berada ditangan bangsa Inggris
Tahun 1840 - 1910	berada ditangan bangsa Belanda
Tahun 1911 - 1942	berada ditangan bangsa Inggris
Tahun 1942 - 1945	berada dibawah pemerintah Jepang
Tahun 1945 - 1948	berada dibawah pemerintahan Indonesia
Tahun 1949 - 1963	berada ditangan bangsa Inggris
Tahun 1964 - 1969	berada ditangan bangsa Indonesia
Tahun 1970	sejak 1 Januari 1970 sudah berbentuk Joint Venture
Tahun 1970 - 1972	sejak tanggal 20 Juli 1970 status Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Dwikora IV adalah menjadi milik Negara Indonesia Tahun 1972 - 1973 dikelola oleh PPS (perusahaan Perkebunan Subang)
Tahun 1973 - 1979	dikelola oleh PT Perkebunan XXX
Tahun 1979 -sekarang	mulai tanggal 1 Maret 1979 PT Perkebunan

XXX dibubarkan dan dilimpahkan kepada :

1. PT Perkebunan XII
2. PT Perkebunan XIII
3. PT Perkebunan XIV

Yang dilimpahkan kepada PT Perkebunan XII ialah bekas Perkebunan Cipeundeuy, Sukareja dan Jalupang, yang selanjutnya disatukan dengan nama PT Perkebunan XII Jalupang - Subang yaitu seluas 5.710,44 Ha. Disamping areal tersebut diatas PT Perkebunan XII juga menerima bekas Perkebunan Serangsari (Kebun Teh) yang pengelolaanya yang diserahkan kepada PT Perkebunan XII Panglejar - Cikalong Wetan - Bandung..

Areal konsensi PT Perkebunan XII Jalupang - Subang memang cukup luas yang meliputi jumlah : 5.710,44 hektar, Tetapi sewaktu dilimpahkan oleh PT Perkebunan XXX keadaanya sudah rusak berat, tanaman karet nya hanya sebagian kecil saja sedangkan yang lainnya hanya merupakan tanah kosong belaka. Semenjak dikelola oleh PT Perkebunan XII, maka secara berangsur - angsur tanah kosong tersebut ditanami dengan tanaman karet, kelapa dan coklat.

Tanggal 11 Maret 1996 di Subang terdiri dari tiga PTP :

PTP XI

PTP XII

PTP XIII

Lalu semenjak saat itu ketiga perkebunan diatas bergabung menjadi PT Perkebunan Nusantara VIII.

2.4 Lokasi Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Jalupang terletak di Jalan Raya Cipeundeuy Km.20, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang Jawa Barat. Tempat kedudukan PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Jalupang tersebut dipandang sangat baik dan menguntungkan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

a. Jauh dari Lingkungan Masyarakat

Bahan untuk pengolahan yang diperlukan oleh perusahaan mudah diperoleh dengan tersedianya bahan olah tersebut. Sehingga proses produksinya pun dapat berjalan dengan lancar dan baik dengan tidak mencemari lingkungan masyarakat sekitar Perusahaan.

b. Pemasaran

Letak perusahaan memudahkan konsumen untuk mengangkut atau mengirim produksi perusahaan. Sehingga penjualan hasil produksi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan mudah untuk dilaksanakan. Konsumen dari perusahaan ini adalah berbagai perusahaan yang berhubungan dengan karet alam.

c. Tenaga kerja

Untuk hal tenaga kerja perusahaan merekrut beberapa karyawan yang berdomisili di desa sekitar perusahaan, dengan demikian perusahaan dapat

memperoleh tenaga kerja yang banyak dengan biaya yang relatif murah. Tapi yang terpenting adalah tenaga kerja di perusahaan ini adalah tenaga kerja yang produktif.

d. Transportasi

PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Jalupang berjarak 1.5 Km dengan jalan raya yang cukup strategis. Sehingga memudahkan dalam hal transportasinya baik yang menghubungkan antara pabrik dengan konsumen, bahan baku dan tenaga kerja yang ada di dalam maupun di luar perusahaan.

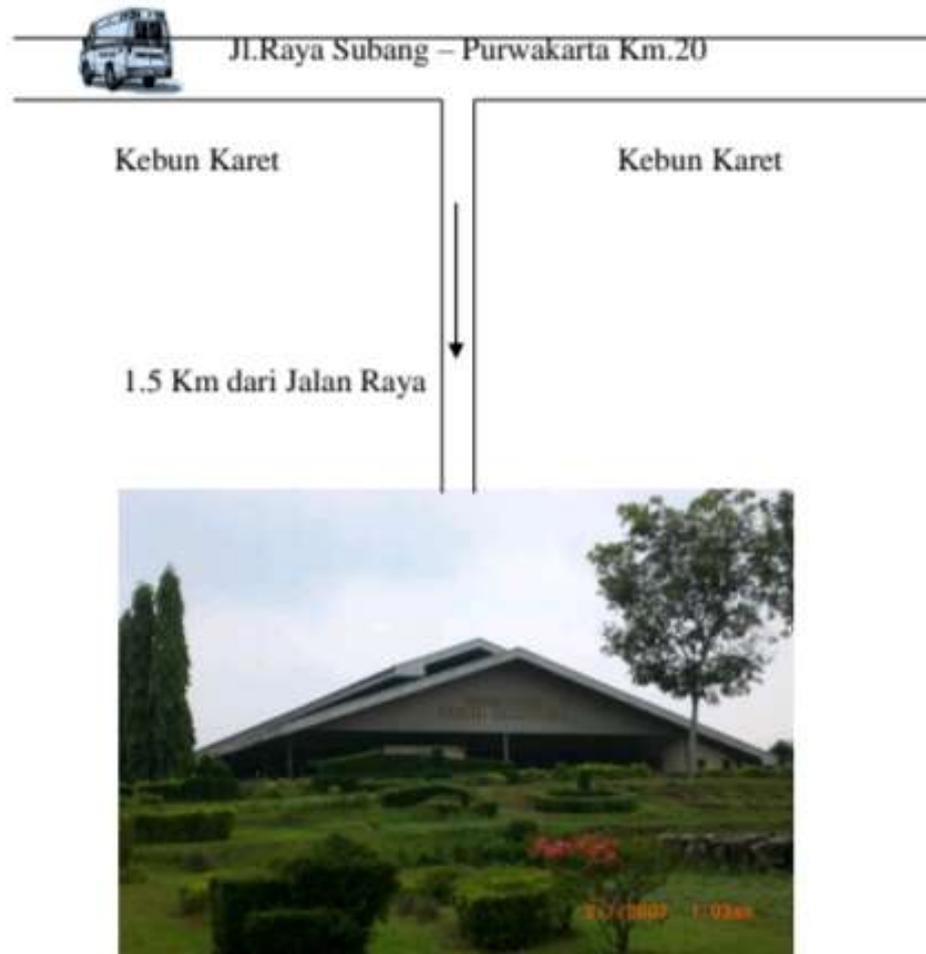
e. Sarana Perumahan Karyawan, Air dan Listrik

Fasilitas rumah dinas, air dan listrik yang memadai akan sangat membantu kelancaran proses produksi perusahaan.

Disamping pertimbangan strategis di atas, masih ada pertimbangan lain, yaitu faktor sosial, diantaranya:

- a. Mengurangi jumlah pengangguran dengan cara memberikan lapangan pekerjaan dengan padat karya.
- b. Membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama pada masalah industri perkaretan secara nasional.
- c. Mempertahankan kondisi lingkungan yang hijau dan asri serta menepis isu pemanasan global.

Berikut peta lokasi letak PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Jalupang, ditunjuk pada Gambar 2.

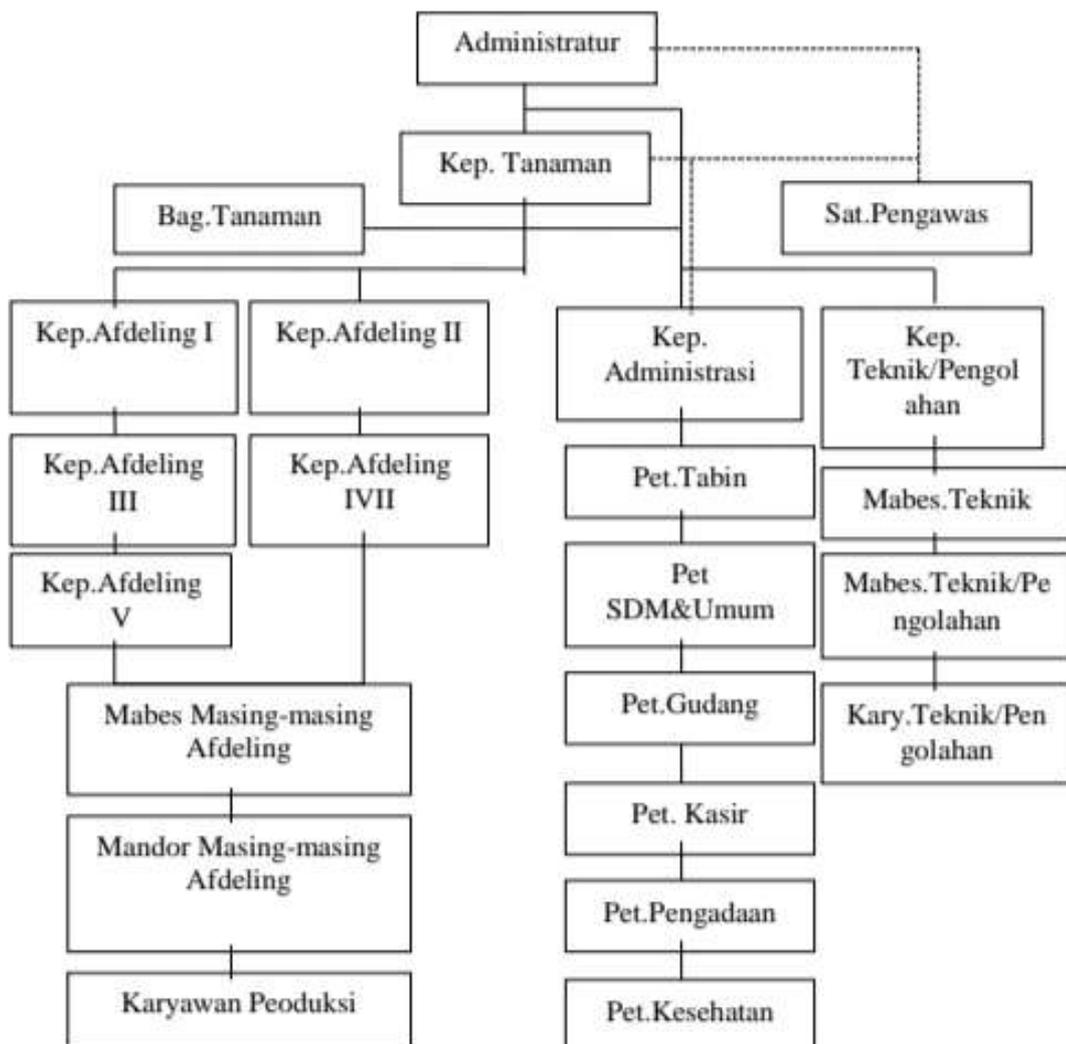


Gambar 2. Peta PTPN VIII Jalupang

Sumber : PTPN VIII Jalupang, 2007

2.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Jalupang ini berbentuk garis. Kekuasaan dan tanggung jawab tertinggi dipegang oleh satu pimpinan. Jadi perintah dari pimpinan langsung kepada bawahan. Struktur organisasi PTPN VIII JALUPANG dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi PTPN VIII Jalupang

Sumber : Dokumentasi PTPN VIII Jalupang, 2023.

Dalam bagan seperti terlihat di atas, dapat diuraikan wewenang dan tanggung jawab unsur pimpinan atas ikhtisar pekerjaannya adalah sebagai berikut:

1. Administratur

Administratur bertugas merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan

mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelancaran jalanya kinerja unit atau Kebun yang di pimpinannya.

2. Kepala Tanaman

Bagian ini bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran tugas pekerjaan bidang tanaman sesuai dengan kebijakan Direksi dan arahan dari Administratur.

3. Kepala Administrasi

Bagian ini melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan bidang tata usaha dan keuangan sesuai dengan kebijakan deireksi dan arahan administratur.

4. Kepala Teknik dan Pengolahan

Bagian ini melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran tugas pekerjaan bidang pengolahan dan teknik sesuai dengan kebijakan direksi dan arahan administratur.

5. Kepala Teknik dan Pengolahan

Bagian ini melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran tugas pekerjaan bidang pengolahan dan teknik sesuai dengan kebijakan direksi dan arahan administratur.

6. Kepala Teknik dan Pengolahan.

Bagian ini melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran tugas pekerjaan bidang pengolahan dan teknik sesuai dengan kebijakan direksi dan arahan administratur.

7. Kepala Teknik dan Pengolahan

Bagian ini melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran tugas pekerjaan bidang pengolahan dan teknik sesuai dengan kebijakan direksi dan arahan administratur.

8. Kepala Teknik dan Pengolahan

Bagian ini melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran tugas pekerjaan bidang pengolahan dan teknik sesuai dengan kebijakan direksi dan arahan administratur.

9. Kepala Teknik dan Pengolahan

Bagian ini melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran tugas

pekerjaan bidang pengolahan dan teknik sesuai dengan kebijakan direksi dan arahan administratur.

10. Kepala Teknik dan Pengolahan

Bagian ini melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran tugas pekerjaan bidang pengolahan dan teknik sesuai dengan kebijakan direksi dan arahan administratur.

11. Kepala Teknik dan Pengolahan

Bagian ini melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran tugas pekerjaan bidang pengolahan dan teknik sesuai dengan kebijakan direksi dan arahan administratur.

12. Kepala Afdeling

Bagian ini tugasnya melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan di masing-masing afdeling sesuai dengan kebijakan direksi dan arahan administratur juga kepala tanaman.

13. Mandor Besara Afdeling

Bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan panen produksi dan perawatan tanaman di masing-masing afdeling kebun sesuai dengan arahan administratur, Kepala tanaman dan kepala afdeling.

14. Mandor

Bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan panen produksi dan perawatan tanaman di kemandorannya sesuai dengan ketentuan dan arahan kepala afdeling dan mandor besar.

15. Bagian Tanaman

Bertugas untuk membantu Kepala Tanaman dalam melaksanakan tugas dan kelancaran pekerjaan administrasi tanaman sesuai dengan pedoman dan peraturan yang telah ditetapkan.

16. Mandor Besar Pengolahan

Melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan bidang pengolahan sesuai dengan ketentuan dan arahan kepala teknik dan pengolahan.

17. Mandor Pengolahan

Bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan penerimaan bahan baku lateks dan pengolahan awal di Pabrik sesuai dengan arahan kepala teknik dan pengolahan.

18. Satuan Pengawas Intern Kebun

Bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas dan pemeriksaan dan pengawasan inten Kebun.

19. Petugas Tabin

Bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tata buku induk sesuai dengan peraturan perusahaan.

20. Petugas SDM dan Umum

Melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan urusan umum dan pengelolaan personil sesuai dengan peraturan dan ketentuan perusahaan serta arahan dari atasan.

21. Petugas Kasir

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagai kasir sesuai dengan peraturan dan ketentuan perusahaan.

22. Petugas Pengadaan

Melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pengadaan/pembelian barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

23. Petugas Gudang

Melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan pergudangan sesuai dengan peraturan perusahaan dan arahan dari atasan.

24. Petugas Kesehatan

Melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

2.6 Kondisi Lingkungan

Secara astronomis letak geografis kebun jalupang berada di antara $107^{\circ}34'55.54''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}31'02.13''$ Lintang Selatan. Secara umum, Kebun jalupang berada pada ketinggian antara 50 – 100 meter dpl dengan topografi datar sampai bergelombang.

Jenis tanah yang terdapat di kebun jalupang adalah latusol dengan pH tanah antara 6-7, stuktur tanah remah, temperatur berkisaran antara 22° – 32°C , kelembaban tanah relatif berkisaran 80 – 81%, dan penyinaran matahari 60 - 65%. Tipe curah hujan termasuk kelas B dengan curah hujan berkisaraan antara 1.500 – 3.500 mm per tahun dengan jumlah hari hujan antara 160 – 210 hari per tahun dan memiliki tipe iklim C2+.

2.7 Visi Dan Misi PT.Perkebunan Nusantara VIII

Visi “ Menjadikan perusahaan Agri Bisnis Global yang dipercaya, mengutamakan kepuasan pelanggan dan kepedulian lingkungan dengan berlandaskan kepada mutu dan produktivitas tinggi, serta didukung oleh SDM yang professional ”.

Misi “ Memenuhi harapan pelanggan serta memacu pertumbuhan mereka melalui penyediaan produk PTPN VIII, yang bermutu dan senantiasa berkembang dengan lestari sesuai dengan prinsip “ *Good Corporate Governance* ” (GCG) yang dilaksanakan oleh personil yang handal.